

## Menkominfo: Serangan Siber Tak Bisa Dicegah, Terjadi Terus-Menerus

JAKARTA (IM) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, saat ini pemerintah sedang melakukan evaluasi sistem untuk penanganan serangan siber. Dia mengungkapkan bahwa serangan siber tidak bisa dicegah dan terjadi secara terus-menerus.

"Kita melakukan evaluasi itu bagaimana untuk lebih meningkatkan keseluruhan sistem dalam rangka untuk ke penanganan atau pencegahan serangan siber," ujar Johnny di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (19/9).

"Karena serangan siber tentu tidak bisa dicegah, dia berlangsung terus menerus," ujarnya.

Menurutnya, evaluasi akan menasar dua hal, yakni pada konteks perlindungan sistem, dan penanganan insiden atau serangan siber. Johnny menuturkan, untuk menangani insiden serangan siber diperlukan sejumlah persiapan. Misalnya, dengan menguji andal atau tidaknya sebuah sistem elektronik di kementerian/lembaga.

"Tetapi untuk sektor privat semua penyeleng-

gara sistem elektronik atau institusi-institusi privat yang melakukan atau menyediakan sistem elektronik itu juga sama harus menyiapkan agar bisa tahan terhadap serangan siber," tegas Johnny.

Sementara itu, saat disinggung soal perkembangan pengamanan data yang telah dibocorkan oleh hacker Bjorka baru-baru ini, dia menyebut Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) saat ini sedang bekerja. Penanganan yang dilakukan BSSN saat ini hanya bersifat jangka pendek.

"Tapi untuk jangka menengah dan panjang, penanganannya kan harus dilakukan dengan baik. Yang pertama pasti dari bagaimana konsolidasi di sektor penyelenggara negara yaitu dengan membentuk satuan tugas yang sudah dikoordinasikan langsung oleh Wakil Menko Polhukam (Mahfud MD)," jelas Johnny.

"Juga kita melakukan pendalaman-pendalaman teknis karena tidak saja regulasi, pasti dibutuhkan juga teknis sistem dan perangkat dan SDM," katanya menambahkan. ● mei

## Nasdem Anggap Kesiapan Anies Jadi Capres sebagai Langkah Maju

JAKARTA (IM) - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku siap maju sebagai calon presiden merupakan sebuah langkah maju.

Sebab, Anies merupakan salah satu nama bakal calon presiden dari Partai Nasdem berdasarkan hasil rapat kerja nasional pada Juni 2022, di samping Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

"Apabila ada kader-kader atau bakal calon yang kami rekomendasikan di Rakernas sudah secara resmi mengatakan kesediaannya, itu salah satu langkah maju," kata Plate di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/9).

Plate mengatakan, pihaknya pun menghormati sikap Anies tersebut karena mencalonkan diri sebagai presiden merupakan hak setiap warga negara.

"Ya itu hak warga negara, proses politiknya tentu berjalan panjang, ini kan sudah masuk ke tahun politik," ujar Plate.

Namun, ia mengingatkan, calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem kelak harus mampu dan bersedia melanjutkan pembangunan yang dimulai oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Plate juga menekankan bahwa Nasdem butuh berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi ambang

batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi DPR. Terkait itu, ia pun menegaskan, keputusan mengenai calon presiden yang diusung Nasdem dan koalisi yang diikuti Nasdem berada di tangan Ketua Umum Surya Paloh.

"Dua hal ini saling berhubungan dan masih berjalan secara dinamis di dalam diskusi-diskusi yang penuh tanggung jawab untuk keberlangsungan pembangunan nasional," kata Plate.

Anies menyampaikan dirinya "siap" untuk maju sebagai Presiden RI pada 2024, meskipun belum mengamankan tiket dari partai politik mana pun. Dengan masa jabatan yang bakal habis pada bulan depan, Anies telah muncul dalam berbagai jajak pendapat lembaga survei independen sebagai kandidat terkuat yang bakal ikut mentas di Pilpres 2024.

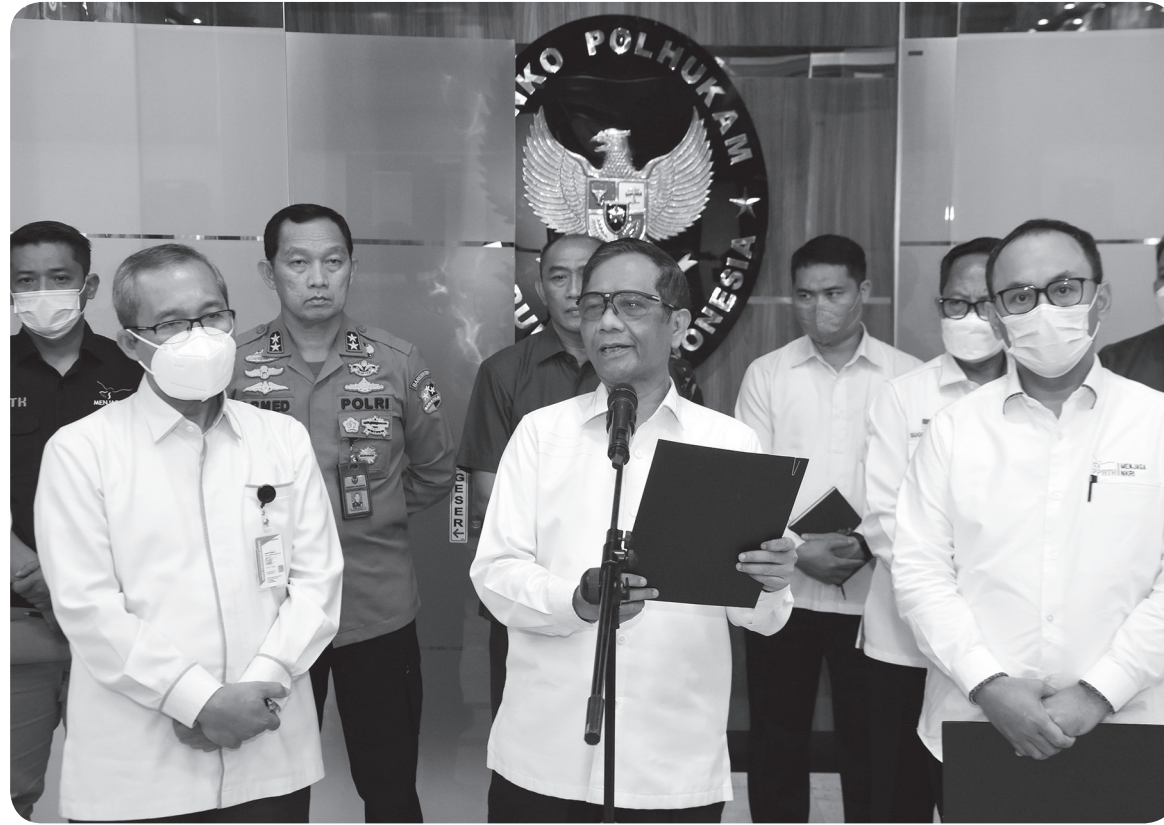
"Saya siap maju sebagai presiden seandainya ada partai politik mencalonkan," kata Anies kepada wartawan dalam wawancara di Singapura, seperti dikutip pada Jumat (16/9) lalu.

Ia mengatakan, tidak terganggu sebagai kader partai politik membuatnya leluasa berkomunikasi dengan semua faksi.

"Survei-survei independen ini dilakukan sebelum saya bahkan berkampanye. Menurut saya, mereka memberi saya kredibilitas lebih," ungkap eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. ● mei

# 2 Polhukam

FOTO/ANT



## KONPRES MENKOPOLHUKAM TERKAIT KASUS KORUPSI DI PAPUA

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) Mahfud MD (tengah) didampingi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata (kiri) dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (kanan) menyampaikan keterangan pers terkait kasus korupsi di Papua, di Kantor Kemenkopolkam, Jakarta, Senin (19/9). Menkopolkam menghimbau kepada Gubernur Papua Lukas Enembe untuk kooperatif dalam mengikuti proses pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan dirinya serta menegaskan hal tersebut tidak terkait dengan unsur-unsur politis.

# Jubir TPNPB OPM Bantah Panglimanya Pernah Temui Ketua Komnas HAM Taufan

Jubir TPNPB OPM mengatakan, jika kelompok OPM yang ditemui Komnas HAM adalah faksi Demianus Magai Yogi, maka dipastikan mereka bukan pimpinan TPNPB OPM.

JAKARTA (IM) - Juru Bicara Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) Sebyby

Sembom membantah Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, Ahmad Taufan Damanik, yang menyatakan pernah bertemu

panglima tertinggi mereka.

Sebyby mengatakan bahwa pernyataan Taufan itu hanya klaim sepihak. Karena, menurut dia, TPNPB OPM di bawah Goliath Tabuni tak pernah melakukan pertemuan dengan Komnas HAM RI.

"Itu tidak benar dan pernyataan Ketua Komnas HAM RI Taufan Damanik ini hanya sebatas mengangkat citra Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)," kata Sebyby saat

dihubungi wartawan, Senin (19/9).

Sebyby mengatakan, bantahan yang dikeluarkan oleh OPM merupakan respons dari pemberitaan media yang menulis pengakuan Taufan Damanik.

Sebyby menegaskan, jika kelompok OPM yang ditemui Komnas HAM adalah faksi Demianus Magai Yogi, maka dipastikan mereka bukan pimpinan TPNPB OPM.

"Kami di Komando Nasional TPNPB tidak mengakui kelompok Demianus Magai Yogi dan mereka itu kelompok binaan TNI/Polri di Paniai," ucap Sebyby.

"Oleh karena itu pernyataan Komnas HAM RI ini kami tolak karena mereka tidak pernah ketemu TPNPB OPM di Komando Nasional di bawah Pimpinan Gen Goliath Tabuni dan Mayor General Lekar Telengen," ujarnya.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik sebelumnya mengatakan, dirinya sempat bertemu dengan Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam pertemuan yang berlangsung di Papua beberapa waktu lalu itu, Panglima OPM itu mengharapkan terjadinya perdamaian tanpa kekerasan di Papua.

Harapan Panglima OPM tersebut, kata Taufan, agar Komnas HAM bisa menjadi fasilitator dialog damai antara OPM dan pemerintah Indonesia.

"Mereka berharap Komnas HAM dapat membantu memfasilitasi dialog damai ini, jadi kalau ada orang yang bilang mereka (OPM) tidak setuju (untuk berdamai), tidak benar! Saya bertemu langsung," kata Taufan, saat dikonfirmasi, Jumat (9/9) lalu.

Namun Taufan tidak menyebutkan siapa panglima

OPM yang dimaksud. "Tidak perlu disebutkan sekarang ini, yang penting semua pihak sudah berkehendak untuk menyelesaikan masalah Papua dengan jalan dialog damai," ujarnya.

Taufan juga menceritakan perjuangan Komnas HAM agar dialog damai ini bisa tercipta.

Tim dari Komnas HAM, kata dia, langsung turun ke Papua dengan segala risiko nyawa di daerah yang sedang berkonflik.

"Saya sudah turun ke hutan, di sana penuh risiko, bagaimana kalau saya ditembak? Disandera? Saya alami itu semua," ucap Taufan.

Semua hal itu dia ceritakan bukan untuk pamer prestasi, Taufan mengatakan, upaya Komnas HAM terjun langsung ke lapangan sebagai upaya mewujudkan perdamaian di Papua.

Taufan menegaskan, jalan damai di Papua adalah satu-satunya jalan terbaik untuk mengatasi konflik kekerasan berkepanjangan di bumi timur Indonesia itu. "Apa mau kita setiap hari mencatat orang mati, orang menjadi korban kekerasan?" katanya.

Taufan optimis, pemerintah Indonesia bersama OPM mampu menyelesaikan konflik Papua dengan cara yang damai. Karena menurut dia, Indonesia sudah memiliki pengalaman melakukan perdamaian saat terjadi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di provinsi Aceh.

"(Dialog damai) pernah dilakukan di Aceh dan kita menjadi contoh dunia dengan satu cerita kesuksesan melakukan dialog damai di Aceh itu. Siapa bilang kita enggak bisa? Bangsa ini bangsa besar karena itu pasti dia berjaya besar menyelesaikan masalah ini," kata Taufan. ● han



## UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA BPK

Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ahmad Noor Supit mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/9). Komisi XI DPR menggelar uji kelayakan atau fit and proper test sembilan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2022-2027.

## SBY Duga Pemilu 2024 Bakal Tidak Jujur, PKB: Bukan Pernyataan Main-main

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai, pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal dugaan Pemilu 2024 akan diatur oleh pihak-pihak tertentu, bukan main-main.

Kendati demikian, Jazilul menyebut bahwa PKB belum melihat kecenderungan Pemilu 2024 akan diatur sedemikian rupa sebagaimana pernyataan SBY. SBY sebelumnya mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.

"Saya yakin ini bukan statement yang main-main. Namun, kami belum melihat indikator-indikator itu. Belum melihat ada skenario yang nanti terjadi pemilu yang tidak jujur atau pemilu yang tidak adil," kata Jazilul saat dihubungi, Senin (19/9).

"Dan semua partai yang saya tahu tidak ingin pemilu

itu tidak jujur dan tidak adil," katanya.

Jazilul menegaskan, PKB juga merasa tidak tertuduh atas pernyataan SBY. PKB tidak mungkin menjadi pihak yang ingin pemilu berlangsung tidak adil dan tidak jujur.

"Tapi statement itu adalah statement yang serius yang disampaikan oleh Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat maupun mantan Presiden," ujarnya.

Oleh sebab itu, Jazilul menyarankan SBY mengungkap siapa aktor di balik dugaan Pemilu 2024 akan berjalan tidak adil. Menurutnya, harus diungkap apakah aktor tersebut berasal dari partai maupun non-partai.

"Karena setahu saya, partai-partai politik ingin agar pemilu berjalan dengan jujur (jujur adil)," ujarnya.

Di sisi lain, Jazilul tidak mempersoalkan dugaan SBY bahwa hanya akan ada dua pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024. Sebab tidak ada

larangan yang mengatur untuk memutuskan jumlah paslon pada pilpres.

"Yang tidak boleh adalah terlaksananya pemilu yang tidak jujur dan tidak adil. Itu tidak boleh," imbuh Wakil Ketua MPR itu.

Sebelumnya diberitakan, SBY mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil. Lantaran adanya informasi tersebut maka ia mesti turun gunung untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9) lalu.

Video pidato itu viral di media sosial, termasuk diunggah oleh akun Instagram DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, @pdemokratsumut.

Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Lokot Nasution membenarkan video tersebut diambil dalam Rapatnas Demokrat.

Dalam video itu, SBY mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikhendaki oleh mereka," kata SBY. ● han

FOTO:ANT



## EDUKASI BAHAYA OBAT TRADISIONAL MENGANDUNG BKO

Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo, Agus Yudi Prayudana (kiri) dan Asisten II Setda Provinsi Gorontalo, Iswanta (kanan) melihat obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya di Kota Gorontalo, Gorontalo, Senin (19/9). BPOM Gorontalo melakukan edukasi kepada masyarakat, pemerintah daerah, pelaku usaha dan media mengenai bahaya obat tradisional mengandung bahan kimia obat (BKO).

**mandiri**

**PENAWARAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE)**

Bahwa dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan penjualan atau pengalihan piutang (Cessie) terhadap debitur sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat Debitur	Jumlah Tagihan per Tgl 19 September 2022	Alamat Agunan
1.	PT. Sarana Tani Jaya	Jl. Karang Tengah Raya No. 26 Lebak Bulus Jakarta Selatan	390.947.000,00	Jalan Raya Pramuka No. 77 Bekasi

Apabila ada yang berminat dalam pengalihan kredit debitur di atas dapat menyampaikan penawaran secara tertulis ke alamat dibawah ini paling lambat tanggal 22 September 2022, jam 10.00 WIB.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk  
Retail Collection & Recovery Group  
Regional Retail Collection & Recovery Region V  
Wisma Mandiri II Lt.17  
Jl. Kebon Sirih No.83, Jakarta 10340.  
Telp. 30023002 Ext. 7224397, 7129421

Demikian untuk diketahui semua pihak.

Jakarta, 20 September 2022  
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk  
Regional Retail Collection & Recovery Region V / Jakarta 3

**mandiri**

**PENAWARAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE)**

Bahwa dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan penjualan atau pengalihan piutang (Cessie) terhadap debitur sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat	Jumlah Tagihan per Tgl 12/09/2022	Agunan Kredit
1.	Andi Santoso	Jl. Kebayoran Lama No. 6, Jakarta Selatan Jl. Raya Duri Kosambi Blok D-5 No. 3, Rawas Buyaya, Cengkareng	Rp.534.200.647,00	Jl. Bambu Ori Blok. 10, Perail No. 14, Kel. Rawas Buyaya, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta

Apabila ada yang berminat dalam pengalihan kredit debitur di atas dapat menyampaikan penawaran secara tertulis ke alamat dibawah ini paling lambat tanggal 22 September 2022, jam 15.00 WIB.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk  
Retail Collection & Recovery Group  
Regional Retail Collection & Recovery Region V  
Wisma Mandiri II Lt.17  
Jl. Kebon Sirih No.83, Jakarta 10340.  
Telp. 30023002 Ext. 7224392.

Demikian untuk diketahui semua pihak.

Jakarta, 20 September 2022  
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk  
Regional Retail Collection & Recovery Region V / Jakarta 3

**PENGUMUMAN**

Dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Angkatan Rajawali Internusa tertanggal 19 September 2022, Nomor 38, dibuat di hadapan Dini Lastari Siburitan, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah diputuskan untuk membubarkan PT ANGGUTAN RAJAWALI INTERNUSA, berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan") dan untuk memberesan hak-hak dan kewajiban-kewajiban telah ditunjuk Bapak Rachman Sugiono selaku Likuidator.

Sehubungan dengan pembubaran Perseroan, sesuai ketentuan Pasal 147 dan Pasal 149 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, para Kreditor yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan harap segera membereskan tagihan kepada Perseroan dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini di Jalan Raya Tugu No. 22, RT 003, RW 014, Tugu Utara, Kojja, Jakarta Utara, DKI Jakarta (Up. Bapak Rachman Sugiono - Direktur Utama).

Jakarta, 20 September 2022  
Direksi